

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Jurnal

- Aprilia, S., Junaid, A., Arfah, A., & Ramdhani, M. R. (2021). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Center of Economic Student Journal*, 4(3), 265–275.
- Hamid, M. L., & Christine, C. (2019). Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 419–432.
- Knoblauch, H., & Wilke, R. (2016). The Common Denominator: The Reception and Impact of Berger and Luckmann's The Social Construction of Reality. *Human Studies*, 39(1), 51–69.
- Matondang, M. H., & Hardiana, N. (2023). Sistem PPh Pasal 21 Sebagai Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perguruan Tinggi di Lingkungan PTN XXX. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 465–470.
- Ratmono, D. (2021). Determinants of Positive Motivational Postures: A Survey in A Legal Entity State University. *Sustainable Competitive Advantage*, 2, 324–333.
- Risnarningsih, Suhendri, H., & Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan dan Kemudahan Wajib Pajak... *JEMAP*.
- Rumeksa, P. N. (2012). Eksplorasi Serat Kapuk... *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa dan Desain*.
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*.
- Subandi, H., Alfarizi, M. R., & Hermawan, L. R. (2023). Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21... *JPKMN*.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*.
- Widodo, A. (2007). Konstruktivisme dan Pembelajaran Sains. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

B. Buku

- Berger, P. L. (1996). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*.
- Darmalaksana, W. (2020). *Rekan Proses Kuliah Online: Metode Penelitian*.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan – Edisi Terbaru.

Najmah, Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif.

Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif.

C. Web Page

Dahlan, A. (2019). Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Dipajaki, Benarkah? Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Surat Pemberitahuan (SPT).

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Direktorat Jenderal Perpajakan. (n.d.). Sistem Perpajakan.

Handayani, R. (2022). Pengertian, Fungsi, dan Cara Pelaporan SPT Pajak. Pajak.com.

Putri, A. (2024). Status PTN-BH: Penambahan Beban Kewajiban Perpajakan. Universitas Andalas.

Safruddin. (2024). Mencermati Kompleksitas Pemotongan PPh Pasal 21 pada PTN BH. DDTC News.

D. Report

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

E. Thesis

Husainudin, F. (2020). Cangkruk Pada Masyarakat Surabaya.

Prianthara, I. B. T. (2011). Konstruksi Sosial Praktek Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali).